



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 kepada masyarakat dilaksanakan dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana dalam Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan RLPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat.

RLPPD pada hakikatnya merupakan informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, selanjutnya sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, muatan RLPPD adalah sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja makro;
- b. Ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar;
- c. Hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya;
- d. Ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah; dan
- e. Inovasi daerah.

Hal-hal yang terangkum di dalam RLPPD ini, tentunya akan menjadi informasi bagi masyarakat untuk melihat berbagai keberhasilan maupun kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan kebijakan daerah yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk kesepakatan bersama dalam perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Tapanuli Utara setiap tahunnya.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 pada hakikatnya merupakan komitmen dan upaya bersama seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tapanuli Utara dalam mewujudkan visi “**Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata**” sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024. Perumusan dan pendalaman terhadap makna yang terkandung dalam visi dimaksud menghasilkan pilar-pilar visi dengan pemahaman sebagai berikut :

Tapanuli Utara : adalah seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Kabupaten Tapanuli Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Lumbung Pangan : bermakna bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan serangkaian aktivitas terpadu di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan termasuk agroindustri dan pemasarannya dalam kerangka sistem dan usaha agribisnis untuk mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi melalui investasi pada sektor pertanian, penyerapan tenaga kerja dan/atau pengurangan pengangguran, penanggulangan dan/atau pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta revitalisasi pedesaan dan pemantapan ketahanan pangan;

Lumbung Sumber

Daya Manusia : bermakna bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan serangkaian aktivitas terpadu dalam pengembangan potensi sumberdaya manusia yang diarahkan untuk dapat menghasilkan masyarakat manusia) yang memiliki keunggulan kompetitif dalam hal penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta memiliki wawasan global dengan kearifan lokal (berbudi pekerti luhur);

Berkualitas : bermakna perwujudan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara yang sehat, cerdas dan berbudaya sebagai pelaku utama pembangunan yang mampu mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal dalam mengembangkan dan meningkatkan produktivitas perekonomian daerah;

Daerah Tujuan

Wisata : bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara diarahkan dengan mendayagunakan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan sosial budaya sebagai aset wisata yang bernilai tambah ekonomi, ilmu pengetahuan dan budaya secara berkelanjutan.

Kemudian misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang dihadapi. Misi disusun untuk memperjelas langkah yang harus dilakukan dalam rangka mencapai visi. Misi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara untuk lima tahun ke depan adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan
2. Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumberdaya lokal
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan IPTEK dan pengembangan jiwa kewirausahaan
5. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup

7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem *e-government*.

I. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Untuk mengukur capaian kinerja makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat 6 (enam) indikator, yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per kapita dan Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini).

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak yang terkait dalam pembangunan nasional secara umum dan pembangunan daerah secara khusus. Capaian kinerja makro Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Laju Kinerja Tahun 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	76,86	77,48	+0,62 poin
2	Angka Kemiskinan	Persen	8,54	8,21	-0,33 poin
3	Angka Pengangguran	Persen	1,03	1,21	+0,18 poin
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,75	4,77	+0,02 poin
5	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ribu rupiah/perkapita/tahun)	(ribu rupiah/perkapita/tahun)	32.466*	34.494**	+6,24 persen
6	Ketimpangan Pendapatan	Persen	0,262	0,242	-0,020 poin

Sumber data : BPS Tapanuli Utara, Tahun 2024

II. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan mencakup urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, selanjutnya urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Indikator pelaksanaan pelayanan dasar selanjutnya dimuat dalam Standar Pelayanan Minimal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun pelayanan dasar dimaksud terdiri dari 6 (enam) urusan :

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Urusan Sosial

Berikut disampaikan gambaran capaian kinerja urusan pelayanan dasar bersumber dari aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id> sebagai berikut:

1. URUSAN PENDIDIKAN

A. CAPAIAN KINERJA

No	Indikator Pencapaian	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah Pelaksana
1	Pendidikan Anak Usia Dasar (PAUD)	68,60%	70,46%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Pendidikan Dasar	95,31%	89,37%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Pendidikan Kesetaraan	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

B. REALISASI BELANJA

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
			Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			87.012.591.473	86.191.743.142	99,06%
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		47.256.637.948	47.029.104.428	99,52%
1	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	503.986.000	492.130.000	97,65%
2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	422.860.000	422.860.000	100%
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	285.970.000	285.970.000	100%
4	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	79.570.000	78.420.000	98,55%
5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	842.773.000	801.800.000	95,14%
6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1.686.981.248	1.580.400.000	93,68%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
			Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	149.999.900	138.190.900	92,13%
8	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	39.174.013.800	39.174.013.800	100,00%
9	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	1.000.050.000	990.194.000	99,01%
10	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	97.363.000	97.363.000	100%
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	3.013.071.000	2.967.762.728	98,50%
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		32.046.369.000	32.031.934.650	99,95%
12	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	186.540.000	186.540.000	100%
13	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	532.311.000	527.633.000	99,12%
14	Pembangunan Laboratorium	Ruang	1.287.993.000	1.285.410.000	99,80%
15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	2.689.666.000	2.684.580.650	99,81%
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	180.000.000	180.000.000	100%
17	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang	719.895.000	719.895.000	100%
18	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	192.834.000	192.834.000	100%
19	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	100.000.000	98.670.000	98,67%
20	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	171.315.000	171.059.000	99,85%
21	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	25.412.840.000	25.412.840.000	100%
22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Ruang	173.245.000	173.245.000	100%
23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang	49.730.000	49.730.000	100%
24	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	200.000.000	199.498.000	99,75%
25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	150.000.000	150.000.000	100%
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		7.015.904.525	6.468.824.564	92,20%
26	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	1.853.950.000	1.630.800.000	87,96%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
			Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
27	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	189.999.800	145.565.264	76,61%
28	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	4.921.954.925	4.643.754.400	94.35%
29	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	49.999.800	48.704.900	97,41%
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		693.680.000	661.879.500	95,42%
30	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	693.680.000	661.879.500	95,42%

C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Beberapa permasalahan dan solusi untuk urusan Pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Minimnya Anggaran yang bersumber DAU untk melaksanakan Kegiatan SPM terkait Peningkatan Mutu Guru Seperti Guru-guru PAUD yang masih didominasi yang belum S1	Belum Ada solusi yang dilaksanakan karena keterbatasan dengan anggaran

2. URUSAN KESEHATAN

A. CAPAIAN KINERJA

No	Indikator Pencapaian	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah Pelaksana
1	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	94,11%	108,79%	Dinas Kesehatan
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	97,73%	94,00%	Dinas Kesehatan
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97,69%	93,42%	Dinas Kesehatan
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	95,78%	93,99%	Dinas Kesehatan
5	Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95,85%	98,73%	Dinas Kesehatan
6	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	63,70%	121,27%	Dinas Kesehatan
7	Persentase Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	95,22%	99,08%	Dinas Kesehatan
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	88,01%	99,93%	Dinas Kesehatan
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	Dinas Kesehatan
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	117,63%	Dinas Kesehatan
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	91,68%	100%	Dinas Kesehatan
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	86,46%	95,06%	Dinas Kesehatan

B. REALISASI BELANJA

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		SERAPAN (%)
			ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	6.993.581.950	3.470.948.350	49,63
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	948.635.000	948.371.000	99,97
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	211.213.500	199.558.500	94,48
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.687.480.000	1.671.785.000	99,07
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	42.520.000	42.170.000	99,18
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	632.785.100	609.063.850	96,25
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	88.078.000	88.078.000	100,00
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	88.078.000	88.078.000	100,00

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		SERAPAN (%)
			ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.614.756.000	1.489.297.000	92,23
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.389.966.000	1.385.806,000	99,70
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	224.790.000	103.491.000	46,04
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	212.119.400	198.091.800	93,39
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	212.119.400	198.091.800	93,39
		3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	568,303,400
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0			0	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	62.810.400			62.810.400	100,00

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		SERAPAN (%)
			ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	398.385.000	45.934.000	11,53
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	107.108.000	57.963.295	54,12
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.730.331.800	4.722.656.200	99,83
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	39.210.000	39.210.000	100,00
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.230.631.000	1.228.976.000	99,87
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.460.490.800	3.454.470.200	99,83
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	78.164.000	72.774.000	93,10
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78.164.000	72.774.000	93,10

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		SERAPAN (%)
			ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	228.660.000	228.425.000	99,90
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	228.660.000	228.425.000	99,90
6	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	129.262.000	124.075.000	95,99
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	129.262.000	124.075.000	95,99
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	171.141.200	170.606.200	99,68
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7.080.000	7.080.000	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	34.469.200	34.469.200	100,00
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	129.592.000	129.057.000	99,59

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		SERAPAN (%)
			ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
8	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.086.844.000	1.086.739.000	99,99
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0	0	0
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	23.904.000	23.904.000	100,00
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.062.940.000	1.062.835.000	99,99
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	562.256.534	550.840.000	97,96
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	514.006.534	502.650.000	97,79
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	48.250.000	48.190.000	99,88

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		SERAPAN (%)
			ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
10	PERSENTASE ODGJ BERAT YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA SESUAI STANDAR	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	211.458.000	203.219.490	96,10
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	150.000.000	143.271.490	95,51
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	21.200.000	21.100.000	99,53
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	40.258.000	38.848.000	96,50
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	207.157.950	194.171.500	93,73
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	207.157.950	194.171.500	93,73
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.277.929.600	1.269.317.000	99.32
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		SERAPAN (%)
			ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	879.429.600	871.072.000	99,05
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	398.500.000	398.245.000	99,94
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	163.680.000	144.841.000	88,49
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	163.680.000	144.841.000	88,49
12	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	128.140.000	124.365.000	97,05
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	95.190.000	94.275.000	99,04
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	32.950.000	30.090.000	91,32

C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Beberapa permasalahan dan solusi untuk urusan Kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Kuranginya kesadaran ibu hamil untuk melakukan ANC guna memantau kondisi ibu hamil dan janin, mendeteksi komplikasi kehamilan sejak dini serta melakukan pemeriksaan secara mandiri masih rendah	Kunjungan Bidan Home care dan memberikan edukasi terkait manfaat dan tujuan ANC serta peran Bidan dalam pelaksanaan P4K yaitu : melakukan pendataan ibu hamil untuk mengetahui jumlah ibu hamil dalam merencanakan persalinan yang aman.
2	Kuranginya ketrampilan Petugas Kesehatan dalam pertolongan persalinan dalam penanganan komplikasi persalinan serta kurangnya pengetahuan ibu bersalin terkait perawatan ibu hamil,persalinan dan pasca persalinan	Meningkatkan kompetensi pengetahuan dan ketrampilan petugas kesehatan seperti on The Job Training kegawatdaruratan yang dilaksanakan di Rumah Sakit dan pendampingan Tim Ahli dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dokter spesialis anak bagi dokter,Bidan,Perawat dalam penanganan kelahiran
3	Pendanaan yang ditampung untuk pemeriksaan skrining hipotyroid kogenital pada bayi baru lahir dengan sasaran pusdatin tahun 2024 sebanyak 6.129 bayi lahir sedangkan jumlah bayi lahir real di tahun 2024 : 3.791 bayi. Dan tidak keseluruhan bayi lahir tersebut di periksa SHK karena pelaksanaan dan pengadaan BMHP SHK dilaksanakan mulai dari Juli 2024.	Untuk pengadaan BMHP agar dipercepat sehingga pemeriksaan segera dilakukan ke seluruh bayi baru lahir. Pelatihan kepada Petugas kesehatan agar lebih paham pengambilan sampel SHK pada bayi baru lahir.
4	Rendahnya kunjungan ibu datang membawa balita ke posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balitanya	Melakukan kampanye cegah stunting kepada ibu balita agar rutin membawa balitanya ke posyandu
5	Kuranginya pengetahuan pengelola UKS dalam pelaporan bulanan serta masih ada wilayah puskesmas yang sulit dijangkau oleh petugas, sehingga tidak semua siswa tercover mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	Membuat pertemuan dengan Pengelola UKS puskesmas tentang pelaporan dan mengusulkan kepada puskesmas agar dalam melaksanakan pelayanan kesehatan bagi anak sekolah mengikutsertakan bidan desa di wilayah kerja masing-masing

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
6	Petugas pengelola program PTM Dinas Kesehatan yang sangat terbatas membuat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ke lapangan sangat terbatas, Belum semua Posbindu memiliki alat Posbindu KIT, jumlah Stik pemeriksaan Kolesterol dan Asam Urat dan Diabetes Mellitus terbatas mengakibatkan kurangnya minat usia produktif datang ke Posbindu, masih kurang pahamnya petugas Posbindu untuk melakukan pengentrian laporan ke aplikasi ASIK karena pergantian pengentrian Laporan dari SIPTM ke ASIK	Mengusulkan untuk menambah jumlah staf pengelola PTM Dinkes, Membuat workshop dengan petugas PTM Puskesmas tentang pelaporan dengan ASIK, mengusulkan ke bagian pengadaan untuk pengadaan stik kolesterol, asam urat & Diabetes mellitus.
7	Kurangny Keterampilan Pengetahuan Petugas Kesehatan Pengelola Lansia dalam memahami Perawaan Jangka Panjang Pada Usia Lanjut	Meningkatkan Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan Petugas Kesehatan Pengelola lansia dengan melaksanakan pembinaan teknis dan penguatan Puskesmas Santun Lansia dan Perawatan Jangka Panjang Lansia
8	Petugas pengelola program PTM Dinas Kesehatan yang sangat terbatas membuat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ke lapangan sangat terbatas, Belum semua Posbindu memiliki alat Posbindu KIT, jumlah Stik pemeriksaan Kolesterol dan Asam Urat dan Diabetes Mellitus terbatas mengakibatkan kurangnya minat usia produktif datang ke Posbindu, masih kurang pahamnya petugas Posbindu untuk melakukan pengentrian laporan ke aplikasi ASIK karena pergantian pengentrian Laporan dari SIPTM ke ASIK.	Mengusulkan untuk menambah jumlah staf pengelola PTM Dinkes, Membuat workshop dengan petugas PTM Puskesmas tentang pelaporan dengan ASIK, mengusulkan ke bagian pengadaan untuk pengadaan stik kolesterol, asam urat & Diabetes mellitus.
9	Petugas pengelola program Keswa Dinas Kesehatan yang sangat terbatas membuat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ke lapangan sangat terbatas, masih kurang pahamnya petugas Keswa Puskesmas untuk melakukan pengentrian laporan ke aplikasi SIMKEWA.	Mengusulkan untuk menambah jumlah staf pengelola ODGJ Dinkes, Membuat workshop dengan petugas PTM Puskesmas tentang pelaporan dengan SIMKEWA.

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
10	Catridge TCM masih kurang, SDM Analis laboratorium masih kurang	Pengadaan Catridge TCM dan penambahan tenaga analis laboratorium di setiap puskesmas
11	Rapid 1 HIV skrining masih kurang, SDM Analis laboratorium masih kurang	Pengadaan Rapid 1 HIV skrining dan penambahan tenaga analis laboratorium di setiap puskesmas

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

A. CAPAIAN KINERJA

No	Indikator Pencapaian	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 202	Perangkat Daerah Pelaksana
1	Jumlah Warna Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	83,76%	85,84%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Jumlah Warna Negara yang memperoleh Layanan pengolahan air limbah domestik	87,39%	93,31%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

B. REALISASI BELANJA

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		SERAPAN (%)
			ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
1	PENYEDIAAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	15.385.517.000	15.041.397.927	97,76

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		SERAPAN (%)
			ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	15.385.517.000	15.041.397.927	97,76
		Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	10.335.517.000	10.121.099.497	97,93
		Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	5.050.000.000	4.920.298.430	97,43
2	PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	8.062.400.000	8.061.082.128	99,98
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.062.400.000	8.061.082.128	99,98
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	7.912.400.000	7.911.219.500	99,99
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	150.000.000	149.862.628	99,91

C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Beberapa permasalahan dan solusi untuk urusan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Sulitnya medan yang harus di tempuh ke daerah terpencil untuk melakukan pendataan	Peran aktif dari Pemerintah Desa sangat dibutuhkan dalam memberikan data kepada OPD pengampu SPM terkait kondisi serta capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah masing-masing.
	Keterbatasan Sumber Daya manusia (SDM) serta peralatan penunjang yang memadai pada Dinas pengampu SPM dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM	Penambahan personil atau menambah jumlah staf yang memiliki kemampuan teknis pada OPD pengampu SPM.
	Minimnya dana yang tersedia pada Dinas pengampu SPM dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM	Dibutuhkan penambahan dana pada bidang yang menangani Program penyelenggaraan penerapan SPM.
	Sulitnya masyarakat dalam menyerahkan lahan ataupun Lokasi pembangunan dalam penerapan SPM	-
2	Sulitnya medan yang harus di tempuh ke daerah terpencil untuk melakukan pendataan	Peran aktif dari Pemerintah Desa sangat dibutuhkan dalam memberikan data kepada OPD pengampu SPM terkait kondisi serta capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah masing-masing.
	Keterbatasan Sumber Daya manusia (SDM) serta peralatan penunjang yang memadai pada Dinas pengampu SPM dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM	Penambahan personil atau menambah jumlah staf yang memiliki kemampuan teknis pada OPD pengampu SPM.
	Minimnya dana yang tersedia pada Dinas pengampu SPM dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM	Dibutuhkan penambahan dana pada bidang yang menangani Program penyelenggaraan penerapan SPM.
	Sulitnya masyarakat dalam menyerahkan lahan ataupun Lokasi pembangunan dalam penerapan SPM	-

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

A. CAPAIAN KINERJA

No	Indikator Pencapaian	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perangkat Daerah Pelaksana
1	Jumlah Warna Negara korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	87%	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Jumlah Warna Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

B. REALISASI BELANJA

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan
			Alokasi Anggaran	Realisasi	
I	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persen	0	0	0%
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	0	0%
	1. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	2. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0%
	3. Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan
			Alokasi Anggaran	Realisasi	
	4. Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	0	0	0%
	5. Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	6. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	0	0	0%
	7. Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	8. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	9. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	10. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		0	0	0%
	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
	2. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan
			Alokasi Anggaran	Realisasi	
	3. Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0%
	4. Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
	5. Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	6. Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	7. Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	8. Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	9. Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	10. Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%

C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Beberapa permasalahan dan solusi untuk urusan Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Keterbatasan Sumber Daya manusia (SDM) serta peralatan penunjang yang memadai pada Dinas pengampu SPM dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM	Penambahan personil atau menambah jumlah staf yang memiliki kemampuan teknis pada OPD pengampu SPM.
2	Minimnya dana yang tersedia pada Dinas pengampu SPM dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM	Dibutuhkan penambahan dana pada bidang yang menangani Program penyelenggaraan penerapan SPM.
	Sulitnya medan yang harus di tempuh ke daerah terpencil untuk melakukan pendataan	Peran aktif dari Pemerintah Desa sangat dibutuhkan dalam memberikan data kepada OPD pengampu SPM terkait kondisi serta capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah masing-masing.

5. URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

A. CAPAIAN KINERJA

No	Indikator Pencapaian	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah Pelaksana
1	Jumlah Warna Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	83,95%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Jumlah Warna Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	22,42%	100%	BPBD
3	Jumlah Warna Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	22,37%	100%	BPBD

No	Indikator Pencapaian	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perangkat Daerah Pelaksana
4	Jumlah Warna Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	BPBD
5	Jumlah Warna Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	97,78%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja

B. REALISASI BELANJA URUSAN TRANTIBUM

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
			Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)			6.775.443.150	6.775.443.150	100%
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		6.500.119.150	6.500.119.150	100%
1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	6.500.119.150	6.500.119.150	100%
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		275.324.000	275.324.000	100%
1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	60.000.000	60.000.000	100%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
			Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	50.000.000	50.000.000	100%
3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	165.324.000	165.324.000	100%

C. REALISASI BELANJA URUSAN KEBENCANAAN

NO	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN			SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN (%)	
					PAGU	REALISASI		
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				241.092.000	233.805.050	96,98%	
	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				0	0	0%
		1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	0	0	0%	
	2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				75.000.000	73.272.300	97,70%
		1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
		2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%	

NO	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN (%)
				PAGU	REALISASI	
	3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	0	0	0%
	5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan	0	0	0%
	6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	75.000.000	73.272.300	97,70%
	7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	-	0	0	0%
	8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	0	0	0%
	10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	0	0	0%
	11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0%
	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	0	0%
	13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	0	0%
	14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit	0	0	0%
	16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	0	0	0%

NO	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN (%)
				PAGU	REALISASI	
	17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0%
	3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		143.692.000	138.538.200	96,41%
	1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	0	0	0%
	2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	82.000.000	80.217.200	97,83%
	3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	4.000.000	629	15,73%
	4	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	6	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	57.692.000	57.692.000	100,00%
	7	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0%
	8	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	0	0	0%
	4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		22.400.000	21.994.550	98,19%
	1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	20.000.000	19.815.150	99,08%
	3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%

NO	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN (%)
				PAGU	REALISASI	
	4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	2.400.000	2.179.400	90,81%
	5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	0	0	0%
	6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	7	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	9	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usahadalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga	0	0	0%
	12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	0	0	0%
	13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	0	0	0%

D. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Beberapa permasalahan dan solusi untuk urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Minimnya Anggaran yang bersumber untuk melaksanakan Kegiatan SPM	Belum Ada solusi yang dilaksanakan karena keterbatasan dengan anggaran

6. URUSAN SOSIAL

A. CAPAIAN KINERJA

No	Indikator Pencapaian	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perangkat Daerah Pelaksana
1	Jumlah Warna Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	92,03%	100%	Dinas Sosial
2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar Panti	77,47%	100%	Dinas Sosial
3	Jumlah Warna Negara Lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar Panti	91,33%	100%	Dinas Sosial
4	Jumlah Warna Negara /Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar Panti	47,11%	47,06%	Dinas Sosial
5	Jumlah Warna Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	88,53%	96,67%	Dinas Sosial

B. REALISASI BELANJA

NO	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			PAGU	REALISASI	%
	Dinas Sosial		297.317.800	252.118.070	84,80
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		140.771.000	97.385.770	
	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL		140.771.000	97.385.770	69,18
1	Penyediaan Permakanan	Orang	2.950.000	2.940.000	99,66
2	Penyediaan Sandang	Orang	24.410.000	3.000.000	12,29
3	Penyediaan Alat Bantu	Orang	37.810.000	30.210.000	79,90
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	3.120.000	1.400.000	44,87
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial	Orang	24.035.650	20.118.900	83,70
6	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	Orang	20.365.350	19.795.500	97,20
7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Infuk Kependudukan, Akta Lahir, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0
8	Pemberian Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	Orang	2.940.000	2.360.000	80,27
9	Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan	Orang	0	0	0
10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang	4.200.000	380.000	9,05
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang	4.760.000	2.830.000	59,45
12	Pemberian Layanan Rujukan	Dokumen	16.180.000	14.351.370	88,70

NO	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			PAGU	REALISASI	%
2	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA		156.546.800	154.732.300	98,84
	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA		156.546.800	154.732.300	98,84
1	Penyediaan Permakanan	Orang	62.946.800	61.132.300	97,12
2	Penyediaan Sandang	Orang	2.475.000	2.475.000	100,00
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit	25.925.000	25.925.000	100,00
4	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Orang	65.200.000	65.200.000	100,00
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang	0	0	0

C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Beberapa permasalahan dan solusi untuk urusan Sosial di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Tidak adanya pendataan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti dan kurangnya anggaran untuk penanganan dan pendataan	Pelatihan kepada Pegawai / SDM Dinsos dan Anggaran SPM dapat di Prioritaskan
2	Tidak adanya pendataan kepada Anak Terlantar di Luar Panti dan kurangnya anggaran untuk penanganan dan pendataan	Pelatihan kepada Pegawai / SDM Dinsos dan Anggaran SPM dapat di Prioritaskan
3	Tidak adanya pendataan kepada Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti dan kurangnya anggaran untuk penanganan dan pendataan	Pelatihan kepada Pegawai / SDM Dinsos dan Anggaran SPM dapat di Prioritaskan

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
4	Tidak adanya pendataan kepada Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti dan kurangnya anggaran untuk penanganan dan pendataan	Pelatihan kepada Pegawai / SDM Dinsos dan Anggaran SPM dapat di Prioritaskan
5	Penyampaian Laporan Bencana Alam dan Sosial tidak disertai dengan Data yang lengkap dan terperinci	Pelatihan kepada Pegawai / SDM Dinsos dan Anggaran SPM dapat di Prioritaskan

III. Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

1. Hasil EPPD tahun sebelumnya

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Untuk tahun 2024 Pemerintah Pusat melaksanakan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023, namun hasil evaluasi tersebut belum dirilis oleh Menteri Dalam Negeri dan direncanakan akan dirilis pada tanggal 25 April 2025 yaitu pada saat peringatan Hari Otonomi Daerah. Kemudian untuk hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2022 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 dengan skor 2,55 status rendah. Sedangkan untuk Tahun 2024 masih dalam tahap proses penyusunan LPPD.

2. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara

Sesuai dengan Surat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 158B/S/XVIII.MDN/05/2024 tanggal 25 Mei 2024 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 bahwa Kabupaten Tapanuli Utara memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), sehingga sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah mendapatkan 10 (sepuluh) kali Opini WTP dari BPK-RI secara berturut-turut yaitu sejak Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2024. Khusus untuk opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 belum terbit, karena sampai dengan saat ini masih dalam tahap pemeriksaan oleh tim BPK Provinsi Sumatera Utara.

IV. Ringkasan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (*Un-audited*) Tahun 2025 atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, realisasi pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp. 1.437.004.579.856,40 atau mencapai sebesar 96,21 persen. Secara terinci target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Uraian	Anggaran Murni	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Realisasi	Capaian Realisasi (%)
Pendapatan Asli Daerah	202.083.203.558,-	141.556.738.834,-	(60.526.464.724,-)	133.379.842.184,40	94,22
Pajak Daerah	35.606.000.000,-	30.050.000.000,-	(5.556.000.000,-)	27.663.738.746,01	92,06
Retribusi Daerah	108.281.600.000,-	86.317.290.000,-	(21.964.310.000,-)	93.784.976.878,78	108,65
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.211.867.299,-	13.211.867.299,-	0,-	8.451.510.307,-	63,97
Lain-Lain PAD yang Sah	44.983.736.259,-	11.977.581.535,-	(33.006.154.724,-)	3.479.616.252,61	29,05
Pendapatan Transfer	1.280.646.611.947,-	1.324.579.290.597,-	43.932.678.650,-	1.281.410.622.741,-	96,74
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.220.227.884.000,-	1.235.542.689.000,-	15.314.805.000,-	1.235.714.217.108,-	100,01
Dana Perimbangan	1.019.472.849.000,-	1.028.851.584.000,-	9.378.735.000,-	1.029.716.994.908,-	100,08
Dana Insentif Daerah	6.867.270.000,-	6.867.270.000,-	0,-	6.867.270.000,-	100,00
Dana Desa	193.887.765.000,-	199.823.835.000,-	5.936.070.000,-	199.129.952.200,-	99,65
Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.418.727.947,-	89.036.601.597,-	28.617.873.650,-	45.696.405.633,-	51,32
Bagi Hasil Pajak Provinsi	60.418.727.947,-	87.036.601.597,-	26.617.873.650,-	45.696.405.633,-	52,50
Bantuan Keuangan Provinsi	0,-	2.000.000.000,-	2.000.000.000,-	0,-	0
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	24.785.561.959,-	27.463.741.837,-	2.678.179.878,-	22.214.114.931,-	80,89
Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi	13.463.233.459,-	13.463.233.459,-	0,-	8.818.078.129,-	65,50
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.322.328.500,-	14.000.508.378,-	2.678.179.878,-	13.396.036.802,-	95,68
Jumlah	1.507.515.377.464,-	1.493.599.771.268,-	(13.915.606.196,-)	1.437.004.579.856,40	96,21

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024, un-Audited

Selanjutnya realisasi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 1.375.858.189.855,41 atau mencapai 95,38 persen dari anggaran sebesar Rp. 1.442.561.794.484. Rincian lebih lanjut mengenai realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Uraian	Anggaran Murni	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Realisasi	Capaian Realisasi (%)
BELANJA OPERASI	1.099.367.046.888,-	1.062.938.481.200,-	(36.428.565.688,-)	1.014.674.115.403,47	95,46
Belanja Pegawai	701.476.442.407,-	669.005.440.000,-	(32.471.002.407,-)	621.410.779.418,-	92,89
Belanja Barang dan Jasa	325.933.715.018,-	317.934.829.606,-	(7.998.885.412,-)	318.291.641.973,47	100,11
Belanja Bunga	3.096.653.900,-	3.096.653.900,-	0,-	2.207.835.420,-	71,30
Belanja Hibah	68.011.735.563,-	72.093.912.994,-	4.082.177.431,-	71.990.363.892,-	99,86
Belanja Bantuan Sosial	848.500.000,-	807.644.700,-	(40.855.300,-)	773.494.700,-	95,77
BELANJA MODAL	107.718.628.745,-	102.975.845.013,-	(4.742.783.732,-)	99.079.324.655,94	96,22
Belanja Modal Tanah	0,-	164.000.060,-	164.000.000,-	164.000.000,-	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.414.451.192,-	24.198.460.613,-	9.784.009.421,-	26.958.423.144,-	111,41
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.077.513.600,-	15.765.583.800,-	(9.311.929.800,-)	14.949.241.861,74	94,82
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	56.904.027.734,-	62.693.955.540,-	5.789.927.806,-	56.854.991.209,34	90,69
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.257.636.219,-	112.635.000,-	(11.145.001.219,-)	111.469.430,-	98,97
Belanja Modal Aset Lainnya	65.000.000,-	41.210.000,-	(23.790.000,-)	41.199.010,86	99,97
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,-	3.531.157.371,-	(1.468.842.629,-)	3.454.947.220,-	97,84
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,-	3.531.157.371,-	(1.468.842.629,-)	3.454.947.220,-	97,84
BELANJA TRANSFER	267.053.508.100,-	273.116.310.900,-	6.062.802.800,-	258.649.802.576,-	94,70
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	267.053.508.100,-	273.116.310.900,-	6.062.802.800,-	258.649.802.576,-	94,70
Jumlah	1.479.139.183.733,-	1.442.561.794.484,-	(36.577.389.249,-)	1.375.858.189.855,41	95,38

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024, un-Audited

Terakhir disampaikan realisasi penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 18.262.684.820,87 atau 99,94 persen dari anggaran sebesar Rp. 18.272.950.857, sedangkan realisasi Pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 69.282.056.597 atau 99,96 persen dari anggaran sebesar Rp. 69.310.927.641. Rincian lebih lanjut mengenai realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Uraian	Anggaran Murni	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Realisasi	Capaian Realisasi (%)
Penerimaan Pembiayaan	40.934.733.910,-	18.272.950.857,-	(22.661.783.053,-)	18.264.856.637,87	99,96
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.934.733.910,-	18.272.950.857,-	(22.661.783.053,-)	18.264.856.637,87	99,96
Pengeluaran Pembiayaan	69.310.927.641,-	69.310.927.641,-	0,-	69.282.056.597,-	99,96
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	69.310.927.641,-	69.310.927.641,-	0,-	69.282.056.597,-	99,96

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024, un-Audited

V. Inovasi

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Tahun 2023 dan masih berlangsung sampai dengan tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan beberapa terobosan yang diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat, yaitu sebagai berikut :

No.	Nama Inovasi	Deskriptif Inovasi	PD Pelaksana
1	MALUMMA -PLUS (Mendaftar Antrian melalui Mekanisme Media Android - Promosi, Layanan pengaduan dan informasi)	Aplikasi MALUMMA sebagai Media pendaftaran sekaligus menjadi wadah Informasi yang dapat diakses setiap penggunaanya bertujuan: 1. Memudahkan pengguna layanan mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Tarutung; 2. Mempercepat waktu layanan kesehatan di RSUD Tarutung; 3. Memudahkan pengguna layanan dalam menyampaikan pengaduan dan mendapatkan solusi/tindak lanjut; 4. Mengurangi pemakaian Kertas dalam Pembuatan SKDP (Surat Keterangan Dalam Perawatan)	RSUD Tarutung
2	GERCEP-PENA (Gerak Cepat Penanganan Bencana Tanpa Goresan Pena)	Inovasi "GERCEP PENA" Gerak Cepat Pengananan Bencana tanpa goresan Pena merupakan inovasi berfokus pada tindaklanjut yang secara langsung diberikan sesaat setelah mendapat laporan kejadian bencana dari masyarakat, seperti dari telepon, <i>whatsapp</i> , maupun media sosial <i>facebook</i> .	Dinas PUTR Kabupaten Tapanuli Utara
3	Bola Kasti (Box, Reminder, Laporan, Kantong, Sertifikat Imunisasi)	Keunggulan dan Kebaharuan inovasi Bola Kasti adalah : 1. Mempermudah petugas di desa untuk memberikan imunisasi bagi sasaran, dan mempermudah petugas mencari sasaran yang belum menyelesaikan rangkaian imunisasinya sehingga diperoleh pelaporan yang akurat dan semua anak di wilayah kerja Puskesmas Sitadatada diharapkan imunisasinya lengkap; 2. Setiap Baduta yang sudah mendapat Imunisasi Dasar Lengkap/Lanjutan diwilayah kerja Puskesmas Sitadatada memiliki Sertifikat yang disahkan oleh Ka. UPT Puskesmas Sitadatada	UPTD Puskesmas Sitadatada
4	BARISTA MUDA (Pembayaran retribusi Sewa Tanah mudah)	Inovasi berupa Pembangunan Aplikasi untuk penatausahaan Retribusi Penyewaan Tanah mengakomodir pembuatan Id Billing sebagai kode identifikasi pembayaran atau setoran yang akan dilakukan oleh Wajib Retribusi.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

No.	Nama Inovasi	Deskriptif Inovasi	PD Pelaksana
		<p>Penambahan kanal-kanal pembayaran Retribusi Penyewaan Tanah baik kanal tunai maupun non tunai berbasis Id Billing akan memudahkan Wajib Retribusi dalam melakukan transaksi pembayaran Retribusi Penyewaan Tanah. Selain itu, sistem penatausahaan yang sudah terdigitalisasi melalui pembuatan aplikasi (realtime) akan memudahkan monitoring dan evaluasi realisasi serta pengambilan kebijakan</p>	
5	<p>SABAR MENANTI (Stop Buang Air Besar Sembarangan Masyarakat Sejahtera dan Mandiri)</p>	<p>Tahapan pelaksanaan inovasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Penyuluhan; 2. Melakukan pertemuan untuk menciptakan komitmen untuk Stop Buang Air Besar Sembarang Bersama PMD, TNI/Polri, Camat, Petugas Kesehatan, Kepala Desa, Kader dan Masyarakat; 3. Arisan Jamban; 4. Jemput Bola terkait pengaduan tentang Jamban; 5. Monitoring langsung kerumah masyarakat untuk memastikan masyarakat sudah memiliki jamban atau tidak; 6. Adanya Swadaya dari masyarakat yang ada di wilayah kerja Puskesmas Sipahutar 	<p>UPTD Puskesmas Sipahutar</p>
6	<p>Pengolahan Lahan Gratis dengan Mekanisasi (PANGDAM</p>	<p>Program yang diberikan melalui Inovasi PANGDAM ini adalah pengolahan lahan masyarakat sebanyak 3 kali pengolahan (2 kali bajak dan 1 kali router) secara gratis/tidak dipungut biaya. Melalui program ini tentunya akan meningkatkan luas tambah tanam komoditi pertanian dan mengurangi biaya produksi pengolahan lahan dari petani di Kabupaten Tapanuli Utara</p>	<p>Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara</p>
7	<p>Bank NIK (Beri Anak Stunting Makan Ikan)</p>	<p>Puskemas Siatas Barita memberlakukan program pemberian makan ikan dalam bentuk olahan seperti nugget ikan. Balita tidak menyukai ikan yang diolah begitu saja. Sehingga diolah dalam bentuk nugget agar mampu memenuhi gizi balita tersebut</p>	<p>UPTD Puskesmas Siatas Barita</p>
8	<p>TABE (Tapanuli Utara Tangguh Bencana bersama Destana)</p>	<p>Keunggulan dan Kebaruan Inovasi TABE (Tapanuli Utara Tangguh Bencana Bersama DESTANA) merupakan metode penanggulangan bencana khususnya pada tahap pra bencana (upaya pencegahan dan kesiapsiagaan) yang baru pertama kali diterapkan di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2022. Adapun keunggulan dan kebaruan inovasi ini khususnya dalam manajemen penanggulangan bencana di Kabupaten Tapanuli Utara ialah sebagai berikut :</p>	<p>BPBD Kabupaten Tapanuli Utara</p>

No.	Nama Inovasi	Deskriptif Inovasi	PD Pelaksana
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan bencana tidak lagi berfokus pada aspek tanggap darurat tetapi lebih pada keseluruhan manajemen risiko; 2. Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah; 3. Penanganan bencana bukan lagi menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi menjadi urusan Bersama Masyarakat; 4. Alur birokrasi dapat dipangkas pada saat terjadi bencana karena masyarakat sebagai garda terdepan memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan penanganan darurat di desanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing anggota forum/kader 	
9	SIMUDUR-UDUR (Bantuan Benih Ikan Untuk Masyarakat secara Gratis)	Keunggulan dan Kebaharuan Inovasi Simudur-udur adalah Program yang diberikan melalui Inovasi SIMUDUR-UDUR ini adalah bantuan benih ikan untuk masyarakat secara gratis. Bantuan benih ikan merupakan komoditas unggulan yaitu ikan mas, nila dan lele. Selain diberikan bantuan benih ikan masyarakat juga diberikan bantuan pakan ikan untuk awal pertumbuhan ikan. Melalui program ini tentunya akan meningkatkan minat masyarakat dalam membudidayakan, meningkatkan produksi ikan dan meningkatkan ekonomi masyarakat pembudidaya ikan	Dinas Ketapang dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Utara
10	PRO TIO	Inovasi Protio dilaksanakan melalui pengembangan strategi pemasaran produk Protio yang merupakan produk minuman mineral yang berasal dari alam Kabupaten Tapanuli Utara, adapun inovasi yang dilakukan berupa ekspansi pemasaran bahkan sampai ke Kabupaten Tetangga sehingga diharapkan akan menambah pelanggan Protio dan akan menambah PAD Kabupaten Tapanuli Utara	Perusda Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara
11	(Uli Desa) Penggunaan Pewarna Alami Untuk Benang Tenun Ulos	Metode Pembaharuan Inovasi Uli Desa adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara telah bekerja sama dengan lembaga pemerhati pewarna alam yang ada di Jakarta untuk mendukung revitalisasi penggunaan pewarna alam pada benang tenun ulos untuk memberikan pelatihan yang komprehensif akan tanaman – tanaman pewarna alam yang ada di sekitar tempat tinggal para petenun dan bagaimana	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tapanuli Utara

No.	Nama Inovasi	Deskriptif Inovasi	PD Pelaksana
		mengolahnya menjadi suatu produk pewarna benang yang siap pakai dan tidak mencemari lingkungan. Ini merupakan upaya yang dilakukan dikarenakan adanya keterbatasan anggaran Pemerintah untuk peremajaan hamparan tanaman – tanaman pewarna alam	
12	Pangkeker	Inovasi Pangkeker merupakan Inovasi dari PDAM Muall Natio berupa Sistem yang di bangun melalui sistem Peta Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah, Peta Lokasi .Sistem informasi ini mencakup mulai dari Titik rumah pelanggan, jaringan Pipa Transmisi dan distribusi.Dengan adanya sistem yang baru pada PDAM Muall Na Tio maka dapat meminimalisir kelemahan yang telah dianalisis diantaranya dapat melakukan pencarian data pelanggan, menetapkan batas bayar, penggantian password, pimpinan mempunyai hak akses langsung, penentuan tarif, adanya fitur untuk menghitung uang kembalian. Dengan system ini Penaggulangan gangguan dengan mudah di akses titik lokasi, ukuran pipa, titik pelanggan dan Non Pelanggan.	PDAM Muall Na Tio Kabupaten Tapanuli Utara